DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Artikel, dan Dokumen Lainnya

A.Pitlo, *Tafsir Singkat Tentang Beberapa Bab Dalam Hukum Perdata*, Intermasa. 1977.

Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara Indonesia,* Yogyakarta Pascasajana FH UII, 2009.

Ardian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranya,*Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Atip Latifulhayat, *Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (e-commerce)*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 8, 2002.

Ansori Ahmad, *Sejarah dan kedudukan BW di Indonesia*, Jarkarta, Rajawali, 1986.

Azumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani,* Jakarta, TIM ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria: Sejarah Pembentukan Isi dan Pelaksanaannya,* Jakarta, Djambatan, 1997.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* Jakarta, Bumi Aksara, 2001.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Balai Harta Peninggalan,* Buku I, tanpa tahun.

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Balai Harta Peninggalan Buku I,* 1976.

Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Waris),* Bandung, Mandar Maju, 2008.

Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013.

H. Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam,* Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996.

H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata,* Jakarta, Rajawali Pers, 1992.

Kartini Mulyadi, Gunawan Wijaja, *Seri Hukum harta Kekayaan dan Kebendaan Pada Umumnya*,

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan.*

Mukhtar Zamzami, *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group, 2013.

Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia,* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet,kedua, Jakarta, Media Grup, 2006.

R.subekti, *pokok-pokok hukum perdata*, Jakarta, Intermasa Indonesia, 1997.

Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*,Yogyakarta. Graha Ilmu, 2013.

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asa Hukum Perdata.* Bandung, Alumni, 2004.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta, FH UII press, 2014.

Sartono Kartodirdjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1983.

Simanjuntak, P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan. 1999.

Soedikno Mertokusumo I, *Hukum dan Polotik Agraria,* Jakarta, Karunika-Universitas Terbuka, 1988.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI PRESS, 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 1985.

Suhardana, *Hukum Pedata* I. Jakarta, Prenhallindo, 2001.

Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok, Rajawali Pers, 2018.

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kecana Prenada Media Group, 2010.

Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata,* Eresco, 1969

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi,* Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2008.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010

B. Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt/12/63/12/96 tentang Surat Keterangan Waris dan Pembuktian Kewarganegaran

C. Media Elektronik

http://www.gultomlawconsultants.com/fungsi-tugas-dan-peran-balai-harta peninggalan-dalam-kewarisan/#, *Fungsi, Tugas dan Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Kewarisan*

https://id.wikipedia.org/wiki/Instruksi_1975

http://anastasiasihombing.blogspot.com/2015/03/peralihan-hak-atas-tanah.html

http://www.academia.edu/10886061/Batal_demi_hukum_merupakan_sanksi_perdata_terhadap_suatu_perbuatan_hukum_yang_mengandung_cacat_yuridis

http://www.penerbitmagnum.com/2016/09/sejarah-komunitas-arab-di-yogyakarta.htm/m=1,

D. Tesis

Tesis Syuhada, *Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam PengelolaanHarta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik Dan Ahliwarisnya (Studi Di Balai Harta Peninggalan Medan),* Universitas Sumatra Utara Medan, 2009

Raudatul fitri, S.H., *Prosedur Adminstrasi Pendaftaran Turun Waris Bagi Golongan Tionghoa Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kota Yogyakarta,* Universita Islam Indonesia Yogyakarta, 2017